

Daya Layan Fasilitas Pendidikan SLTA Pasca Pemekaran Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung

Siti Baroroh
siti.baroroh@yahoo.co.id

Andri Kurniawan
andri.kurniawan@ugm.ac.id

Abstract

Main goal of Indonesian regional expansion is to improve quality of public services for the better public welfare. It is contained in one of Pringsewu Regency's mission, which is to improve the quality of the productive and competitive human resources. One of government's effort is by improving the standard of education become 12-year compulsory education.

The aim of the mini-thesis is to distinguish and analyze affordability on the Pringsewu's public services of education facilities, before and after the expansion. The method used in this research is quantitative method with Paired Sample T-test and Buffer Analysis. Based on the data collected, after expansion there are difference in raw function of availability and potential function of availability significantly. On actual function of availability data, there are no significantly difference between pre- and post-expansion, due to comparison used on total number of students which already had admission quota beforehand on every schools. In six years post-expansion of Pringsewu district, there are 23 high school established spread across regency. On 3000 m buffer map, increasing the number of high school in Pringsewu can be determined. Increasing of education facilities affordability shown from 279 km² to 369 km² of 460 km² Pringsewu Regency area.

Keyword: regional expansion, education facilities, welfare, function of ability

Abstrak

Pemekaran bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna terwujud kesejahteraan. Hal ini terkandung dalam salah satu misi Kabupaten Pringsewu yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan standar pendidikan menjadi wajib belajar 12 tahun.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan menganalisa keterjangkauan fasilitas pendidikan SLTA pra dan pasca pemekaran Kabupaten Pringsewu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan analisis Paired Sample T test dan analisis bffer. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diketahui bahwa pasca pemekaran terdapat perbedaan yang signifikan pada daya layan kasar dan daya layan potensial. Sedangkan daya layan aktual tidak mengalami perbedaan yang signifikan dikarenakan pembandingan pada perhitungan menggunakan jumlah siswa dan setiap sekolah sudah memiliki kuota. Setelah terjadinya pemekaran setidaknya terdapat penambahan sekolah sebanyak 23 SLTA di Kabupaten Pringsewu. Penambahan SLTA tersebut terjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Melalui peta buffer 3000 meter diketahui peningkatan sebelum dan setelah pemekaran. Sebelum terjadinya pemekaran wilayah terjangkau fasilitas seluas 279 km² dan setelah pemekaran menjadi 369 km² dari luas Kabupaten Pringsewu 460 km².

Kata kunci : Pemekaran, Fasilitas Pendidikan, Kesejahteraan, Daya Laya

PENDAHULUAN

Era reformasi memberikan pemikiran baru, yaitu bergantinya sistem sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini tercermin melalui terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang ini menjadi gerbang adanya otonomi daerah yang kemudian disahkan pula melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut menjadi tonggak bahwa pemerintah daerah mewakili masyarakat untuk membentuk daerah otonom dengan menggunakan pemekaran wilayah (Harmantyo, 2007). Pemekaran wilayah merupakan pembagian kewenangan administrasi suatu wilayah yang dahulunya berada dalam satu daerah administratif, dipisahkan menjadi dua atau beberapa daerah administratif (Tarigan, 2010).

Prinsip pemekaran dikatakan sebagai pembelahan wilayah, dengan distribusi parameter tertentu (Felsenstein, 2010). Tujuan pemekaran daerah salah satunya adalah mendekatkan pemerintah pada layanan publik (Romli, 2007) Layanan publik merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan sosial masyarakat. Pemerintah berperan sebagai pengatur, penjamin, dan pengawas (Haryatmoko, 2007).

Istilah pelayanan menurut Moenir (2002) adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana tingkat pemuasannya dapat dirasakan oleh orang yang melayani dan dilayani, tergantung penyedia jasa dalam memenuhi kebutuhan pengguna.

Beberapa teknik analisis pelayanan dapat digunakan mendasarkan pada aspek ketersediaan pelayanan (*Service Availability*), tingkat ketersediaan (*size of availability*), dan fungsi pelayanan (daya layan) atau *function of availability* (Muta'ali, 2015). Analisis fungsi pelayanan merupakan perbandingan antara jumlah

ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding, seperti besarnya pengguna aktual, pengguna potensial, penduduk keseluruhan, luas wilayah dan dengan pembanding standar. Fungsi daya layan memberikan indikasi kualitas dan tingkat tingkat ketercukupan pelayanan, sehingga semakin baik daya layan maka kualitas fasilitas semakin baik. Kondisi daya layan dikatakan baik apabila melebihi standar pelayanan minimum apabila ada (Muta'ali, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara pengumpulan data instansional dan observasi. Pengumpulan data Instansional berupa pengumpulan data jumlah fasilitas SLTA, jumlah penduduk dari berbagai instansi. Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang akan diamati.

Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis daya layan (daya layan kasar, daya layan potensial serta daya layan aktual) dan uji paired simple T-test dan setelah terjadinya pemekaran, analisis pertumbuhan penduduk, proyeksi kebutuhan fasilitas, hirarki pusat pelayanan, analisis persebaran fasilitas SLTA dan analisis peta buffer dengan menggunakan jarak berdasarkan SNI 03-1733-2004.

Tabel 1 Tabel Standar Fasilitas Pendidikan

Jenis Sarana	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kriteria	
		Radius (m)	Lokasi dan Penyelesaian
TK	1.250	500	Ditengah kelompok keluarga.
SD	1.600	1.000	Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi

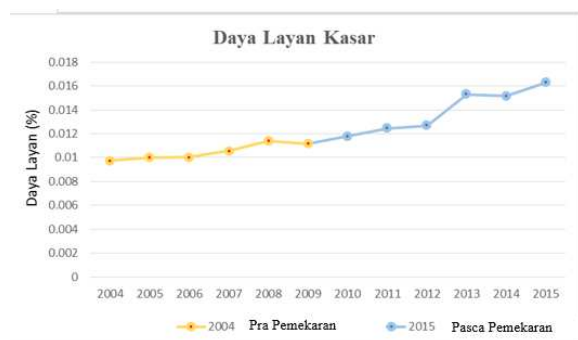
Jenis Sarana	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kriteria	
		Radius (m)	Lokasi dan Penyelesaian
SLTP	4.800	1.000	pengelompokan kegiatan. Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olahraga.
SLTA	4.800	3.000	Tidak selalu harus di pusat lingkungan. Ditengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan lingkungan
Taman Bacaan	2.500	1.000	

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Daya Layan Fasilitas Pendidikan SLTA Pra dan Pasca Pemekaran

Daya layan fasilitas pendidikan merupakan kemampuan untuk melayani sesuatu dalam hal ini adalah fasilitas SLTA di Kabupaten Pringsewu. Daya layan pada tahun 2004 hingga tahun 2015 mengalami perbedaan melalui batas pemekaran. Terdapat tiga jenis daya layan yang dianalisa, yaitu: daya layan kasar, daya layan potensial dan daya layan aktual.

Daya layan kasar merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding berupa jumlah penduduk.

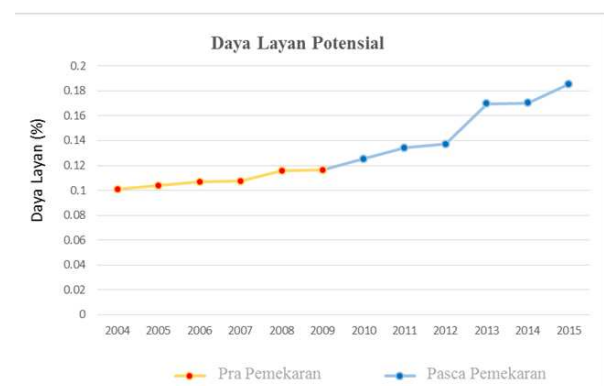


Gambar 1 Grafik Daya Layan Kasar Kab. Pringsewu

Grafik daya layan tersebut memperlihatkan perkembangan daya layan yang terjadi di Kabupaten Pringsewu. Peningkatan nilai daya layan terjadi sejak tahun 2006 hingga tahun 2008. Tahun 2009 mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut merupakan masa transisi atau terjadinya pemekaran. Selanjutnya berangsur menyamai keadaan sebelumnya

pada tahun 2010. Tahun 2011 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup tajam melebihi nilai sebelumnya hal ini dikarenakan pada tahun tersebut mulai mengalami penambahan jumlah fasilitas. Setiap tahun baik sebelum dan setelah pemekaran mengalami kenaikan. Grafik diatas secara tidak langsung menunjukkan bahwa sebelum dan setelah pemekaran terjadi perubahan/penambahan fasilitas SLTA dan pemenuhan pelayanan SLTA pada Kabupaten Pringsewu.

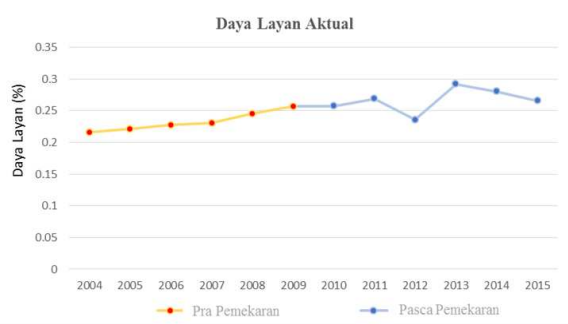
Daya layan potensial merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding berupa jumlah anak usia 15 – 19 tahun.



Gambar 2 Grafik Daya Layan Potensial Kab. Pringsewu

Grafik diatas menggambarkan perkembangan daya layan pada tahun 2004 hingga 2015, dari sebelum pemekaran hingga pemekaran di Kabupaten Pringsewu. Tahun 2004 hingga tahun 2009 mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi pada tahun 2008. Tahun 2010 hingga tahun 2015 atau setelah terjadinya pemekaran terlihat kenaikan drastis, khususnya pada tahun 2013 walaupun pada tahun setelahnya sempat mengalami penurunan namun pada tahun 2015 mengalami kenaikan. Hal ini berarti dengan adanya pemekaran ternyata memengaruhi daya layan fasilitas khususnya pada fasilitas pendidikan.

Daya layan kasar merupakan perbandingan antara jumlah ketersediaan fasilitas dengan variabel pembanding berupa jumlah siswa/i yang mngenyam pendidikan SLTA.



Gambar 3 Grafik Daya Aktual Kasar Kab. Pringsewu

Grafik daya layan aktual memperlihatkan daya layan aktual pada tahun 2005 hingga tahun 2014. Semakin tinggi daya layan berarti semakin cukup fasilitas yang ada dengan jumlah siswa. Pada tahun 2005 hingga tahun 2009 mengalami kenaikan. Tahun 2009 dan 2010 tidak banyak mengalami perubahan. Namun, pada tahun 2012 mengalami penurunan yang drastis dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan walaupun nilainya lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum pemekaran.

B. Efektifitas Fasilitas Pendidikan SLTA

Nilai daya layan diketahui setiap tahunnya daya layan mengalami peningkatan, artinya hampir setiap tahun penduduk pendukung yang mendapatkan fasilitas semakin terlayani. Berikut nilai efektifitas daya layan ;

Tabel 2 Efektifitas Pelayanan

Ket.	Tahun	Jumlah Fasilitas	Jumlah Penduduk	Efektifitas
P R A	2004	35	359265	0.468
	2005	36	359510	0.481
	2006	37	368319	0.482
	2007	37	350422	0.507
	2008	40	351093	0.547
	2009	40	357554	0.537
P A S C A	2010	43	365369	0.565
	2011	46	369336	0.598
	2012	47	370158	0.609
	2013	58	379190	0.734
	2014	58	383101	0.727
	2015	63	386891	0.782

Berdasarkan tabel 4.4 nilai efektifitas pelayanan SLTA dari tahun 2004 hingga tahun 2015. Nilai efektifitas sejak tahun 2015 kurang dari satu, artinya pelayanan fasilitas pendidikan SLTA sejak tahun 2005 hingga tahun 2015 tidak efektif . Semakin tinggi jumlah fasilitas maka semakin sedikit jumlah penduduk dalam satu fasilitas artinya satu fasilitas dapat lebih efektif melayani penduduk. Nilai efektifitas pada tabel diatas diketahui bahwa nilai terendah di tahun 2004 yang mana satu fasilitas melayani 10.265 penduduk padahal standar minimal yang telah ditentukan adalah satu fasilitas berbanding 4800. Nilai efektifitas tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu satu fasilitas menjangkau 6.141 penduduk. Nilai efektifitas setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2015 masih belum mencapai angka satu sehingga semua penduduk belum dapat terlayani.

C. Perbedaan Daya Layan

Deskripsi data digunakan untuk memperoleh kesimpulan dari hasil pengujian. Sebelum melakukan uji Paired Sample T test dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data yang diambil berdistribusi normal atau tidak, selain itu dilakukan pula uji homogenitas.

Tabel 3 Signifikansi Daya Layan

No.	Keterangan	Sig.
1.	Daya Layan Kasar	0,014
2.	Daya Layan Potensial	0,004
3.	Daya Layan aktual	0,582

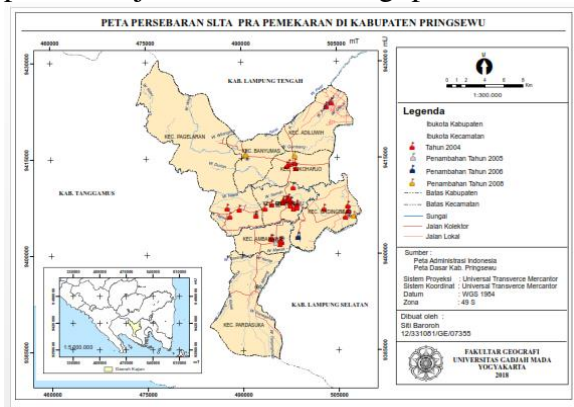
Nilai signifikansi pada tabel tersebut sebesar 0,014 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan daya layan kasar sebelum dan setelah terjadinya pemekaran pada taraf signifikansi 5%. Nilai signifikansi pada tabel tersebut sebesar 0,004 yang mana lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan daya layan kasar sebelum dan setelah terjadinya pemekaran pada taraf sig. 5%. Nilai signifikansi pada tabel tersebut sebesar 0,582 yang mana lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti

tidak terdapat perbedaan daya layan kasar sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.

Melalui daya layan kasar dan daya layan potensial terjadi perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah terjadinya pemekaran. Kedua daya layan tersebut menggunakan jumlah penduduk total dan jumlah penduduk usia 15 – 19 tahun.

D. Persebaran Fasilitas Pendidikan

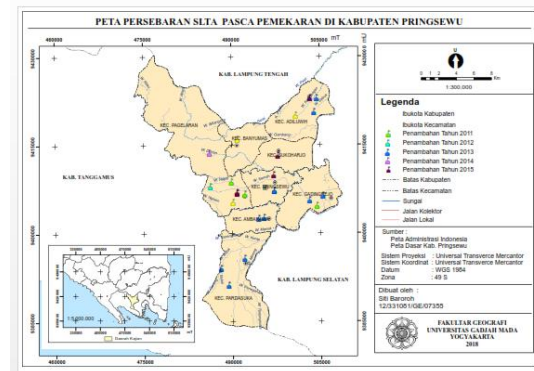
Kabupaten Pringsewu merupakan kabupaten yang memiliki luas $\pm 640 \text{ km}^2$. Luas tersebut terhitung kecil dibandingkan dengan kabupaten lain yang berada di Provinsi Lampung. Seperti yang di jabarkan pada tabel daya layan setiap tahun fasilitas pendidikan khususnya SLTA bertambah. Namun, penambahan tersebut perlu ditinjau kembali dari segi pemerataan.



Gambar 4 Peta Persebaran SLTA Pra Pemekaran Kab. Pringsewu

Pada tahun 2005 seperti gambar di atas tidak jauh berbeda dengan tahun 2004. Jumlah fasilitas pendidikan mengalami penambahan satu sekolah yang berada di Kecamatan Ambarawa. Sekolah tersebut masih berada pada pusat pemerintahan kecamatan tersebut dan berdekatan dengan sekolah-sekolah sebelumnya. Seperti yang terlihat pada gambar di atas bahwa pada tahun 2007 tidak terdapat penambahan sekolah dan sama seperti tahun 2006. Tahun 2008 mengalami penambahan yang drastis menjadi 40 SLTA yang artinya mengalami penambahan sekolah sebanyak tiga sekolah. Tiga sekolah tersebut tersebar di Kecamatan Sukoharjo yang pada awalnya hanya terdapat empat sekolah,

Kecamatan Banyumas yang sebelumnya belum memiliki SLTA dan Kecamatan Gadingrejo. Pada tahun ini Kabupaten Pringsewu belum mengalami pemekaran. Tahun 2008 mengalami sedikit perbedaan dengan adanya penambahan satu sekolah di Kecamatan Gadingrejo yang berada di baragian barat daya kecamatan tersebut dan melengkap di area tersebut dikarenakan belum terdapatnya sekolah di area tersebut.



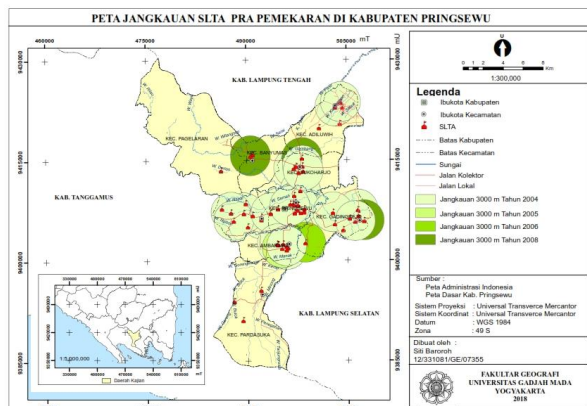
Gambar 4 Peta Persebaran SLTA Pasca Pemekaran Kab. Pringsewu

Pada tahun 2012 terdapat penambahan satu sekolah di Kecamatan Pagelaran dan lagi-lagi di area selatan dan merupakan sekolah swasta. Kecamatan Pegelaran sendiri pada tahun 2012 mengalami pemekaran kecamatan menjadi Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pagelaran Utara. Pada tahun 2013 Kabupaten Pringsewu memiliki kenaikan jumlah SLTA yang tinggi yaitu 11 sekolah. Penambahan tersebut terdapat pada kecamatan Adiluwih sebanyak dua sekolah, Kecamatan Pringsewu sebanyak dua sekolah, kecamatan Gadingrejo dua sekolah, Kecamatan Ambarawa sebanyak dua sekolah dan Kecamatan Pardasuka sebanyak tiga sekolah. SLTA di Kecamatan Adiluwih berada di sekitar sungai tepatnya pada barat kecamatan dan pada daerah tersebut belum terdapat SLTA. Pada Kecamatan Gadingrejo penambahan lebih kepada area pusat daerah dan tersebar di bagian tengah kecamatan dan daerah tersebut belum terdapat SLTA. Sedangkan di Kecamatan Pringsewu penambahan lebih kepada di area pusat kota. Pada Kecamatan Ambarawa fasilitas SLTA berpusat di

tengah kota. Penambahan dua sekolah sendiri merupakan sekolah swasta dan satu yayasan dengan satu sekolah di kecamatan tersebut. Kecamatan Pardasuka yang memiliki penambahan tiga sekolah yang tersebar di tiga daerah terpisah.

E. Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan

Keterjangkauan merupakan rentang atau jarak yang ditempuh untuk mencapai fasilitas SLTA. Keterjangkauan Fasilitas SLTA di Kabupaten Pringsewu dapat diketahui dengan analisis buffer dan mengetahui ciri kecamatan-kecamatan dengan mengelompokkan menjadi tiga hierarki.

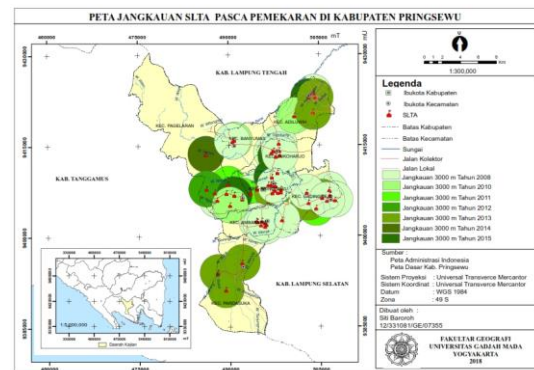


Gambar 5 Peta Jangkauan SLTA Pra Pemekaran Kab. Pringsewu

Melalui gambar 5 dapat diketahui bahwa banyak sekali area yang belum masuk dalam radius SLTA. Jumlah SLTA tahun 2004 telah menjangkau beberapa kecamatan, seperti; Kecamatan Adiluwih, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, dan Kecamatan Sukoharjo. Pada tahun tersebut Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka belum terjangkau SLTA.

Tahun 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009 tidak mengalami penambahan fasilitas yang besar sehingga keterjangkauan pun tidak berpengaruh besar. Kecamatan Banyumas terdapat fasilitas yang berdekatan dengan Kecamatan Pagelaran. Sehingga satu fasilitas tersebut sudah mulai mewadahi peserta didik di dua kecamatan. Selebihnya pada tahun 2007 dan 2009 tidak mengalami penambahan SLTA.

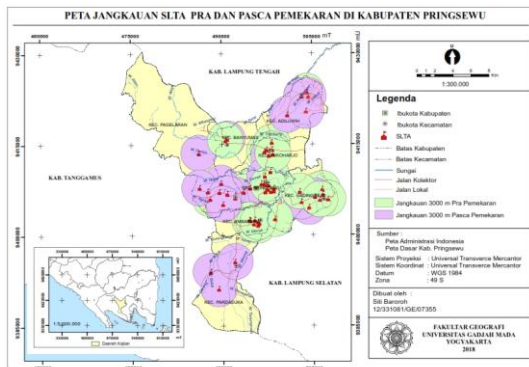
Sebagian besar area Kabupaten Pringsewu belum tersentuh area pendidikan. Sehingga untuk memperoleh pendidikan SLTA satu kecamatan harus menempuh jarak yang cukup banyak. Tahun 2004 Kabupaten Pringsewu masih dalam lingkup Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Pringsewu mengalami pemekaran pada tahun 2009.



Gambar 6 Peta Jangkauan SLTA Pasca Pemekaran Kab. Pringsewu

Tahun 2009 daerah yang belum memenuhi fasilitas pendidikan sudah mulai berkurang terbukti dengan luas daerah yang beada diluar jangkauan. Berikut luasan daerah yang telah terjangkau fasilitas pendidikan SLTA. Seperti yang tergambar dalam peta, tahun 2010 terdapat penambahan SLTA dan menjangkau Kecamatan Adiluwih. Tahun 2011 terdapat penambahan SLTA namun lokasi SLTA tidak di area yang belum terdapat fasilitas. Tahun 2012 terdapat penambahan SLTA yang menjangkau Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pringsewu. Tahun 2013 terdapat beberapa daerah yang memiliki penambah keterjangkauan di Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Adiluwih dan Kecamatan Gadingrejo. Area yang terjangkau pada tahun 2013 semakin meluas terutama di kecamatan Pardasuka yang menjangkau hampir seluruh area. Tahun 2014 muncul Kecamatan Pardasuka, Kecamatan pagelaran terdapat satu SLTA yang menjangkau area selatan Kecamatan Pagelaran. Pada tahun 2015 sebenarnya terjadi penambahan fasilitas namun fasilitas tersebut tidak di area yang belum

terjangkau, sebagian besar sudah terdapat SLTA di area tersebut. Perbandingan sebelum dan setelah terjadinya pemekaran dapat terlihat dalam gambar berikut;



Gambar 7 Peta Jangkauan SLTA Pra dan Pasca Pemekaran Kab. Pringsewu

Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa Kecamatan Adiluwih mengalami perubahan. Sebagian besar sudah terjangkau oleh fasilitas pendidikan. Begitu pula dengan kecamatan Pringsewu, Kecamatan Ambarawa, Sukoharjo dan Gadingrejo seluruh area sudah terjangkau oleh fasilitas pendidikan SLTA. Namun sedikit berbeda dengan Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pardasuka yang belum mengalami perbedaan terkait keterjangkauan. Kedua kecamatan tersebut masih banyak area yang masih kosong dan belum terjangkau. Berikut luasan keterjangkauan

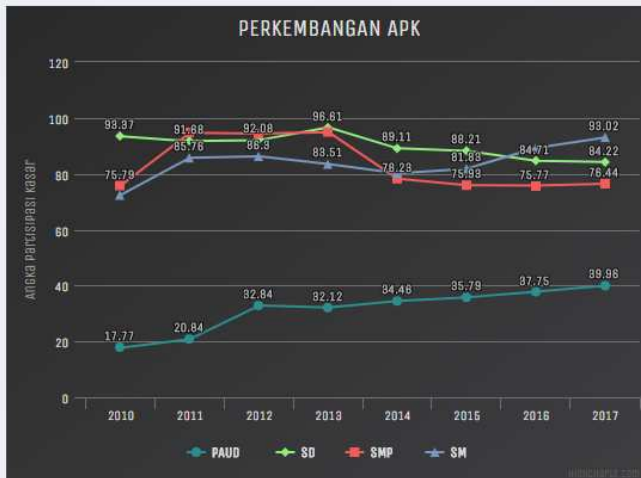
Tabel 4 Luas Keterjangkauan Fasilitas Pendidikan

No	Kecamatan	Sebelum Pemekaran		Setelah Pemekaran	
		Tahun 2004	Tahun 2009	Tahun 2010	Tahun 2015
1	Adiluwih	32,104	37,558	56,949	62,500
2	Ambarawa	26,881	26,881	30,111	30,111
3	Banyumas	3,830	25,443	27,215	30,360
4	Gadingrejo	50,289	60,575	60,575	62,642
5	Pagelaran	44,293	48,894	49,268	78,635
6	Pardasuka	3,387	3,611	3,611	54,390
7	Pringsewu	43,148	43,148	43,148	43,797
8	Sukoharjo	32,985	33,070	33,070	33,757
Luas Area		236,91	279,180	303,947	396,19

Kecamatan Pardasuka hampir sama dengan Kecamatan Pagelaran, dengan luas wilayah yang tinggi namun tidak diimbangi dengan fasilitas. Tahun 2004 area yang terjangkau fasilitas pendidikan mencapai 3,387 km², dan pada tahun 2009 mencapai 3,611 km². Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Sukoharjo merupakan kecamatan padat penduduk, khususnya Kecamatan Pringsewu yang merupakan ibu kota Kabupaten Pringsewu. Area yang terjangkau fasilitas pendidikan terhitung luas yaitu seluas 43,148 km² meskipun pada tahun selanjutnya tidak mengalami peningkatan luas keterjangkauan. Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2004 menjangkau 32,985 km² fasilitas pendidikan dan pada tahun 2009 menjangkau seluas 33,070 km². Tahun 2015 seperti terlihat pada gambar 4.8 mengalami perubahan yang drastis. Hampir semua area sudah terjangkau oleh fasilitas SLTA. Area yang belum terjangkau seluas. Melihat hal tersebut sebenarnya Kabupaten Pringsewu mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya pemekaran baik secara langsung ataupun tidak. Namun, hal yang menjadi perhatian bahwa Kabupaten Pringsewu masih membutuhkan SLTA khususnya di area utara, yaitu Kecamatan Pagelaran Utara dan Kecamatan Pardasuka.

F. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio jumlah siswa yang sedang sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar di Kabupaten Pringsewu untuk jenjang SLTA pada tahun 2009 sebesar 42,32. Hal ini sangat disayangkan dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi partisipasi sebelum terjadinya pemekaran terhitung rendah. Angka Partisipasi Kasar sebagai berikut



Gambar 8 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Pringsewu
Sumber : Kemendikbud RI

Pada tahun 2010 nilai APK mengalami kenaikan hingga pada tahun 2015 nilai APK di Kabupaten Pringsewu 81,83%. Artinya partisipasi untuk menuju jenjang berikutnya tinggi. Nilai tertinggi pada tahun 2015 sedangkan sebelum pemekaran terlihat grafik cukup rendah sebelum terjadinya pemekaran. Walaupun terjadi penurunan angka partisipasi pada tahun 2014 dan 2015. Angka Partisipasi Kasar yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu. Pada nilai APK Kabupaten Pringsewu nilai APK semakin tinggi artinya setelah terjadinya pemekaran berefek pada partisipasi sekolah yang semakin tinggi dan lebih stabil.



Gambar 9 Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pringsewu
Sumber : Kemendikbud RI

Berbeda dengan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Pringsewu yang setiap tahunnya mengalami perubahan. Angka Partisipasi murni merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur tersebut. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Terjadi penurunan APM pada tahun 2014 dan 2015, artinya pada tahun tersebut penduduk diusia sekolah sekolah berkurang ditahun tersebut. Nilai APM pada tahun 2015 sebesar 59,35% anak yang bersekolah tepat waktu.

Nilai APM lebih rendah dibandingkan dengan APK hal ini dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Pada tahun 2015 selisih antara APK dan APM adalah 22,48 artinya terdapat 22,48% siswa mengenyam pendidikan SLTA berusia diatas atau dibawah usia SLTA. Pada konteks pemekaran nilai nilai yang paling mencolok adalah nilai APK yang mengalami perbedaan antara sebelum dan setelah terjadinya pemekaran.

G. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Perkembangan suatu kota berhubungan erat dengan faktor penduduk. Laju pertumbuhan penduduk akan memengaruhi perkembangan suatu kota. Sehingga ketika jumlah penduduk meningkat maka akan ada beberapa hal yang akan terpengaruh sebagai bentuk konsekuensi dari pertambahan penduduk tadi. Salah satu bentuk konsekuensi dari jumlah penduduk adalah akan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana salah satunya adalah sarana pendidikan yang secara fisik yang dapat terlihat adalah fasilitas pendidikan.

Tabel diatas memproyeksikan penduduk pada tahun 2020. Apabila dilihat

jumlah penduduk dari tahun 2005 hingga 2010 hampir semua mengalami kenaikan jumlah penduduk kecuali Kecamatan Pardasuka yang memiliki pertumbuhan penduduk yang kecil. Jumlah penduduk tertinggi berada di dua kecamatan, yaitu; Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu. Kecamatan Pringsewu yang merupakan pusat atau ibukota Kabupaten Pringsewu sehingga memang padat penduduk. Sedangkan Kecamatan Gadingrejo merupakan pusat kegiatan ekonomi bersamaan dengan Kecamatan Pringsewu. Pada tahun 2020 dapat diketahui kenaikan yang cukup tinggi. Apabila dihitung untuk kebutuhan fasilitas SLTA dengan mempertimbangkan satu fasilitas pendidikan untuk 4800 jiwa maka dapat diketahui kebutuhan masing masing kecamatan. Kecamatan Adiluwih diperkirakan membutuhkan 8 SLTA pada tahun 2020 dengan diketahui pada tahun 2015 telah ada enam SLTA sehingga apabila dilihat berdasarkan standar SNI satu sekolah menjangkau 2800 jiwa maka masih mengalami kekurangan sebanyak dua buah.

merupakan pusat atau ibukota Kabupaten Pringsewu sehingga memang padat penduduk. Sedangkan Kecamatan Gadingrejo merupakan pusat kegiatan ekonomi bersamaan dengan Kecamatan Pringsewu. Pada tahun 2020 dapat diketahui kenaikan yang cukup tinggi. Apabila dihitung untuk kebutuhan fasilitas SLTA dengan mempertimbangkan satu fasilitas pendidikan untuk 4800 jiwa maka dapat diketahui kebutuhan masing masing kecamatan. Kecamatan Adiluwih diperkirakan membutuhkan 8 SLTA pada tahun 2020 dengan diketahui pada tahun 2015 telah ada enam SLTA sehingga apabila dilihat berdasarkan standar SNI satu sekolah menjangkau 2800 jiwa maka masih mengalami kekurangan sebanyak dua buah.

Kecamatan Ambarawa diperkirakan pada tahun 2020 akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 47781 jiwa. Pada tahun 2015 telah terdapat 8 SLTA baik negeri ataupun swasta yang sudah ada. Apabila dilihat proyeksi kebutuhan sebanyak 10 maka akan membutuhkan 2 sekolah tambahan. Kecamatan Banyumas pada tahun 2020 diperkirakan terdapat 23107 jiwa. Kebutuhan yang diperlukan dengan jumlah penduduk demikian adalah 5 buah dengan yang sudah ada pada tahun 2015 sebanyak 2 SLTA, sehingga masih membutuhkan 3 SLTA pada tahun 2020.

Kebutuhan pada tahun 2020 diperkirakan sebanyak 17 SLTA dengan yang sudah ada pada tahun 2015 sebanyak 11 SLTA. Hal ini berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 6 SLTA untuk Kecamatan Gadingrejo. Kecamatan Pagelaran memiliki pada tahun 2020 diperkirakan akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 65.664 jiwa. Kebutuhan fasilitas SLTA pada tahun 2020 diperkirakan berjumlah 14 sedangkan yang sudah ada pada tahun 2015 sebanyak 11 SLTA. Kecamatan Pagelaran masih memiliki kekurangan fasilitas sebanyak 3 SLTA dilihat pada tahun 2015.

Tabel 5 Proyeksi Kebutuhan Ruang Kabupaten pringsewu

Kecamatan	2020	Kebutuhan Ruang	Keb. SLTA	J. tahun 2015
Adiluwih	36358	1650,243	8	6
Ambarawa	47781	1255,715	10	8
Banyumas	23107	2596,522	5	2
Gadingrejo	79272	756,882	17	11
Pagelaran	65664	913,7339	14	11
Pardasuka	13470	4454,141	3	3
Pringsewu	78766	761,7477	16	17
Sukoharjo	53189	1128,036	11	6

Tabel diatas memproyeksikan penduduk pada tahun 2020. Apabila dilihat jumlah penduduk dari tahun 2005 hingga 2010 hampir semua mengalami kenaikan jumlah penduduk kecuali Kecamatan Pardasuka yang memiliki pertumbuhan penduduk yang kecil. Jumlah penduduk tertinggi berada di dua kecamatan, yaitu; Kecamatan Gadingrejo dan Kecamatan Pringsewu. Kecamatan Pringsewu yang

Kecamatan Pardasuka diperkirakan akan memiliki jumlah penduduk sebanyak 13.470 pada tahun 2020. Sehingga membutuhkan 3 SLTA pada tahun 2020. Pada saat 2015 sudah terdapat 3 SLTA berarti sudah mencukupi untuk tahun 2020. Kecamatan Pringsewu pada tahun 2020 diperkirakan akan memiliki 78.766 penduduk. Sehingga membutuhkan 17 SLTA untuk mencukupi kebutuhan pada tahun 2020. Pada tahun 2015 telah terdapat 17 SLTA, sehingga untuk tahun 2020 sudah mencukupi dalam pemenuhan kebutuhan. Kecamatan Sukoharjo pada tahun 2020 diproyeksikan akan memiliki 53.189 penduduk. Kebutuhan Fasilitas SLTA pada tahun tersebut dengan melihat jumlah penduduk sebesar 11 SLTA. Pada tahun 2015 telah ada 6 SLTA artinya masih membutuhkan 5 SLTA untuk memenuhi kebutuhan pada tahun 2020.

KESIMPULAN

1. Pemekaran Kabupaten Pringsewu mempengaruhi peningkatan daya layan daya layan kasar dan daya layan potensial sedangkan daya layan aktual tidak mengalami kenaikan yang signifikan hal ini dikarenakan potensi penduduk masuk sekolah yang tinggi namun pada realita angka aktual masih rendah dan terjadi penurunan pada daya layan aktual walaupun mendekati tahun 2015 angka semakin membaik.
2. Keterjangkauan fasilitas pendidikan SLTA semakin tinggi setelah pemekaran, namun masih tetap membutuhkan penambahan fasilitas SLTA bagi beberapa area yang belum terjamah fasilitas pendidikan.

SARAN

1. Terdapat beberapa kecamatan yang masih membutuhkan fasilitas SLTA untuk beberapa tahun kedepan. Khususnya di area Barat Laut Kabupaten atau di kecamatan Pagelaran yang masih belum terdapat

fasilitas. Selain itu di area selatan kabupaten di Kecamatan Pardasuka yang belum terdapat Fasilitas sehingga lebih memperharikan fasilitas-fasilitas khususnya persebarannya.

2. Terdapatnya kebijakan pendirian sekolah khususnya SLTA yang memperhatikan area.

DAFTAR PUSTAKA

- Felsenstein, Daniel dkk. 2010. On the Suitability of Income Inequality Measures for Regional Analysis : Some Evidence from Simulation Analysis and Bootstrapping Tests. *Spacio-Economic Planning Science* 44 (2010) 212 – 219
- Harmantyo, Djoko. 2007. Pemekaran Daerah dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi dan Implementasinya di Indonesia. *Makara Sains* 11 (1) : 16-22.
- Haryatmoko. 2007. *Etika Komunikasi*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius
- Moenir, A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara
- Muta'ali, Lutfi . 2015. *Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan*. Yogyakarta : Badan penerbit Fakultas Geografi
- Romli, Lili. 2007. *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yohyakarta : Pustaka Pelajar
- SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan
- Tarigan, Antonius. 2010 . Dampak Pemekaran Wilayah. *Majalah Perencanaan Pembangunan* 01: 22-26